

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi nasional sebagai upaya untuk membangun seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan salah satu tujuan nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum, seperti yang tersurat pada alinea IV Pembukaan UUD 1945. Pembangunan sebagai salah satu cermin pengamalan Pancasila terutama dijiwai sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia yaitu upaya peningkatan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada tercapainya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. (Kuncoro, 1997:15)

Dalam prospektif ini, pertumbuhan ekonomi dapat memperluas akses publik untuk memperoleh sumber-sumber daya yang diperlukan guna mencapai kesejahteraan masyarakat, mempermudah akses publik untuk memperoleh berbagai fasilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, listrik, akses jalan, dan lain-lain), serta menjamin kesejahteraan infrastruktur dan kontinuitas sumber-sumber daya tersebut bagi kelangsungan hidup masyarakat. (Maqin,2011:10)

Istilah infrastruktur sering digunakan dalam pembangunan kawasan ekonomi, pembangunan kota, dan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur merupakan prasarana publik primer dalam menjalankan perekonomian suatu negara. Keberadaan infrastruktur akan sangat mempengaruhi perekonomian suatu daerah di mana keberadaan infrastruktur dapat mendukung kelancaran

aktivitas ekonomi masyarakat dan distribusi aliran barang. Salah satu modal infrastruktur yang paling sering digunakan adalah jalan, dimana menurut UU Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan di mana jalan berperan sebagai prasarana transportasi yang memiliki peran penting dalam ekonomi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, negara, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan serta dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, sebagai prasarana distribusi harga barang dan merupakan kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat wilayah Republik Indonesia. (Tandung,2015:1)

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ketidacukupan infrastruktur merupakan kunci terjadinya hambatan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. (Ndulu,2005:11)

Pada dasarnya infrastruktur pembangunan dibedakan menjadi: (1) infrastruktur ekonomi yaitu infrastruktur fisik baik yang digunakan dalam proses produksi maupun yang dimanfaatkan oleh masyarakat, meliputi prasarana umum seperti tenaga listrik, telekomunikasi, perhubungan, irigasi, air bersih, teknologi kesehatan, serta pembuangan limbah (2) infrastruktur sosial yaitu prasarana sosial seperti kesehatan dan pendidikan. (Maqin,2011:11)

Simon Kuznet mengatakan bahwa pembangunan infrastuktur merupakan *public service obligation* yaitu sesuatu yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah karena infrastruktur merupakan prasarana publik paling primer dalam mendukung kegiatan ekonomi suatu negara. Ketersediaan infrastruktur juga sangat menentukan

tingkat keefisienan dan keefektifan kegiatan ekonomi serta merupakan prasyarat agar berputarnya roda perekonomian berjalan dengan baik.

Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat baik dari segi ekonomi maupun sosial. Pembangunan infrastruktur akan memenuhi segala kebutuhan hidup masyarakat mulai dari kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Pembangunan infrastruktur adalah kegiatan yang utama yang harus direncanakan dalam suatu daerah atau perkotaan. Pembangunan memerlukan pendekatan yang tepat dengan perencanaan, monitoring dan evaluasi untuk menciptakan pemerataan pembangunan. Agar efektif dan mengena pada seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan infrastruktur harus dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.(Pratiwi,2015:5)

Pemerintah sebagai peranan utama dalam penyediaan infrastruktur selayaknya menjaga kesinambungan investasi pembangunan infrastruktur dan memprioritaskan infrastruktur dalam rencana pembangunan nasional, sehingga infrastruktur dapat dibenahi baik secara kuantitas maupun kualitas. Selain itu perlu pendekatan yang lebih terpadu dalam pembangunan infrastruktur guna menjamin sinergi antar sektor dan wilayah. (Bulohlabna,2008:80)

Upaya mempercepat pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat produktivitasnya. Efisiensi dalam kegiatan ekonomi harus didukung oleh infrastruktur yang memadai sehingga mendorong peningkatan potensi daerah yang berkesinambungan. Pertumbuhan potensi daerah akan mendorong proses pertukaran sesuai dengan kebutuhan

masing-masing dan memungkinkan bergerakinya perekonomian daerah sesuai dengan potensinya, serta secara bersama-sama menuju proses pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat sesuai dengan dengan kemampuannya yang optimal. (Hapsari,2011:4)

Salah satu tujuan suatu negara adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi adalah pendapatan nasional. Pendapatan suatu negara dapat menunjukkan seberapa besar aktivitas perekonomian secara keseluruhan. Konsep pendapatan nasional adalah ukuran yang paling sering dipakai sebagai indikator pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses, bukan merupakan suatu gambaran ekonomi pada suatu periode tertentu, ada perkembangan atau perubahan dan penggunaan waktu. (Boediono, 1992:15)

Dalam mengikuti jalannya pembangunan seringkali dihadapkan pada beberapa ukuran kemajuan suatu perekonomian. Indikator untuk mengetahui kemajuan perekonomian secara nasional dapat dilihat pada nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dan untuk wilayah/provinsi dapat dilihat pada nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai yang terlihat pada PDRB di Indonesia berbeda-beda, ada yang sangat mendominasi dan ada yang tidak. Hal ini dikarenakan pembangunan yang terjadi belum secara merata sehingga terjadi ketimpangan antar wilayah.(Zamzami, 2014:1)

Kuncoro (2001) menyatakan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) berdasarkan provinsi kabupaten, atau kota. Sementara pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB.

Produk Domestik Regional Bruto PDRB merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu. PDRB juga bisa di definisikan sebagai jumlah barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Berdasarkan penjelasan tersebut bisa dikatakan bahwa PDRB merupakan jumlah keseluruhan nilai tambah barang atau jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tertentu, yang pada umumnya dalam waktu satu tahun. ([http://:bps.go.id](http://bps.go.id))

Pertumbuhan ekonomi telah menjadi jalan hidup bangsa dari masing-masing negara. Pemerintah dapat jatuh atau kuat berdiri tergantung dari rendah atau tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi negaranya. (Todaro,1995:79)

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan dalam kapasitas suatu bangsa jangka panjang untuk memproduksi aneka barang dan jasa untuk rakyatnya. Suatu pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang negatif menunjukkan adanya penurunan perekonomian. (Sicat dan Arnth,1991:180)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat hasil pembangunan yang telah dilakukan dan juga berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh akumulasi modal (investasi pada tanah, peralatan, sarana dan

prasarana, sumber daya alam, dan sumber daya manusia) baik jumlah maupun tingkat kualitas penduduknya, kemajuan teknologi, akses terhadap informasi, keinginan untuk melakukan inovasi dan mengembangkan diri serta budaya kerja. (Todaro,2000:37)

Kabupaten Gresik adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Gresik memiliki luas 1.191,25km². Pada daerah tersebut merupakan kawasan industri Java Industrial Ports and Estate (JIPE) di Gresik, Jawa Timur yang ditargetkan dapat menampung sebanyak 183 industri dari berbagai sektor yang akan menyerap investasi senilai Rp83,2 triliun. Dengan berdirinya beberapa perusahaan di kawasan industry terpadu tersebut, diyakini mampu membawa efek berantai terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. (BPS Kabupaten Gresik, 2018:15)

Sensus penduduk merupakan suatu kegiatan pengumpulan atau pencacahan data Kependudukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia. Dalam suatu waktu tertentu seperti yang telah disebutkan dalam undang-undang Nomor 16 tahun 1997 pasal 8 menyebutkan bahwa Sensus Penduduk dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Menurut data statistika Gresik pada tahun 2018, menurut jenis kelamin, Kabupaten Gresik memiliki 661.145 jiwa penduduk laki-laki dan 652.681 penduduk jiwa perempuan sehingga total jumlah penduduk di Kabupaten Gresik berjumlah 1.313.826 jiwa. (BPS Kabupaten Gresik 2018:40)

Kabupaten Gresik merupakan kawasan industri. Banyak sekali industri besar yang beroperasi di Kabupaten Gresik. Perkembang pesatnya segala aktivitas

membuat Kabupaten Gresik menjadi Kota yang terus berkembang dalam mengangkat produktivitas perekonomian. Semua kelancaran pendistribusian aktivitas ini tak lepas dari kemudahan infrastruktur yang ada di Kabupaten Gresik salah satunya infrastruktur jalan, kesehatan dan listrik.(Pratiwi,2015:8)

Oleh karena itu kabupaten Gresik yang mendukung beroperasinya Kawasan Industri agaknya masih harus lebih banyak berbenah terutama mengenai peningkatan infrastruktur. Salah satu infrastruktur yang paling sering digunakan adalah jalan, menurut UU Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan dimana jalan berperan sebagai prasarana transportasi yang memiliki peran penting yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat bangsa dan negara, dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, sebagai prasarana distribusi barang dan merupakan kesatuan sistem jaringan jalan yang menghubungkan dan mengikat wilayah Republik Indonesia.(Tandung, 2015:1)

Selain itu, kesehatan merupakan faktor utama kesejahteraan masyarakat yang hendak diwujudkan pemerintah, maka kesehatan harus menjadi perhatian utama pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah juga dapat menjamin hak masyarakat untuk sehat dengan memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata, memadai, terjangkau, dan berkualitas.(Wibowo, 2014:44)

Pembangunan dan pengelolaan tenaga listrik untuk kebutuhan masyarakat dan kebutuhan industri di dalam kawasan industri. Infrastruktur listrik menjadi hal dalam perkembangan kehidupan manusia modern. Listrik digunakan untuk berbagai kegiatan baik di kota-kota besar maupun di wilayah pedesaan. Kebutuhan

akan energi listrik dari waktu ke waktu semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan sosial masyarakat. Listrik merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari karena hampir seluruh aktivitas masyarakat tergantung pada tenaga listrik.(Wiadayati, 2010:46)

Kabupaten Gresik terdiri dari delapan belas kecamatan yaitu Kecamatan Wringinanom, Driyorejo, Kedamean, Menganti, Cerme, Benjeng, Balongpanggang, Duduksampeyan, Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Dukun, Panceng, Ujungpangkah, Sangkapura, dan Tambak. Laju pertumbuhan Kabupaten Gresik menurut data Badan Pusat Statistika dalam tahun 2010 hingga tahun 2017, menyebutkan bahwa ada kenaikan sebesar 1,26 persen.(BPS Kabupaten Gresik tahun 2018:43)

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Gresik telah berlangsung cukup lama dengan biaya yang cukup besar serta kontribusinya cukup besar terhadap peningkatan pertumbuhan dan produktivitas perekonomian. Namun masih banyak masalah yang dihadapi Kabupaten Gresik, Antara lain kualitas yang masih rendah, perawatan infrastruktur yang kurang memadai dan sebagainya. Maka dari itu, dalam upaya pembangunan ekonomi diperlukan **“Analisis Pengaruh Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Kesehatan, dan Infrastruktur Listrik Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Gresik”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh infrastruktur jalan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di Kabupaten Gresik pada tahun 2005-2017 ?
2. Apakah ada pengaruh infrastruktur kesehatan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di Kabupaten Gresik pada tahun 2005-2017 ?
3. Apakah pengaruh infrastruktur listrik terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di Kabupaten Gresik 2005-2017 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh infrastruktur jalan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di Kabupaten Gresik pada tahun 2005-2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh infrastruktur kesehatan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di Kabupaten Gresik pada tahun 2005-2017.
3. Untuk mengetahui pengaruh infrastruktur listrik terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di Kabupaten Gresik pada tahun 2005-2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, maka manfaat peneliti ini adalah :

1. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat mengetahui pengaruh infrastruktur air bersih, infrastruktur listrik, infrastruktur pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik pada tahun 2005-2017.
3. Bagi mahasiswa, Sebagai bahan Informasi ilmiah dan bahan pertimbangan bagi pihak yang terkait dan calon peneliti selanjutnya baik untuk penelaahan lebih lanjut maupun sebagai bahan perbandingan.
4. Bagi Pemerintah, Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi instansi–instansi terkait dalam mengambil kebijaksanaan yang berhubungan dengan pengembangan daerah.